

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya otonomi daerah. Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah mendelegasikan urusan kepada Pemerintah Daerah yang disebut dengan urusan konkuren (pasal 9). Urusan konkuren diklasifikasi atas urusan wajib yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi; tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa dan seterusnya. UU No. 23 Tahun 2014 Bab 2 Pembagian Wilayah, menyebutkan daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau desa.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum angka kedua menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan

sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dalam pasal 1 Ketentuan Umum angka 12 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu cara memberdayakan masyarakat desa ialah melalui Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (Inisiatif Pemberdayaan Pedesaan dan Peningkatan Pembangunan Pertanian/READSI) Program yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan petani melalui kegiatan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya pedesaan yang meliputi pembangunan pertanian, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat serta pengembangan keuangan mikro pedesaan guna meningkatkan pendapatan di sektor pertanian secara berkelanjutan. Program READSI disetujui oleh *Executive Board Internasional Fund for Agricultural Development* (IFAD) pada tanggal 14 September 2017 dengan total pembiayaan proyek sebesar USD 55,3 juta, terdiri dari pinjaman IFAD (2000001960) sebesar USD 39,8 juta; Hibah IFAD (2000001959) sebesar USD 1 juta, serta kontribusi Pemerintah Indonesia sebesar USD 9,6 juta, privat sektor sebesar USD 2,2 juta dan penerima manfaat USD 2,6

juta. Program READSI ini merupakan pengembangan (*Scaling-up*) *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) yang telah berjalan selama enam tahun (2008-2014) di lima Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah dan Program Replikasi READ yang telah dilaksanakan selama tiga tahun (2015-2017) di empat Kabupaten perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program READ ini dinilai sebagai program yang berhasil oleh Badan Perancangan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dalam menurunkan kemiskinan petani.

Program READSI memiliki 3 komponen utama dan 1 komponen dukungan manajemen program, di antaranya; Komponen 1: pengembangan pertanian dan mata pencarian di pedesaan, Komponen 2: peningkatan pelayanan, penyuluhan, penyediaan saprodi dan pemasaran, Komponen 3: dukungan kebijakan dan strategi pembangunan, Komponen 4: dukungan manajemen program. Dalam komponen 1,2 dan 4 mendapat pembiayaan dari pinjaman IFAD dan pelaksanaannya di bawah koordinasi *National Program Management Office* (NPMO) (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian). Sedangkan komponen ke 3 dikelola terpisah oleh Direktorat Pangan dan Pertanian, BAPPENAS.

Program READSI memiliki beberapa tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya, yakni; tujuan jangka panjang program ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin di wilayah sasaran program yakni (6 Provinsi dan 18 Kabupaten). Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah memberdayakan

rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun kelompok dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bertahap. Sasaran utama dari Program READSI ialah petani dengan kriteria sebagai berikut; **pertama:** petani miskin yang memiliki lahan untuk kegiatan usaha tani dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan ekonomi di sektor pertanian yang didukung oleh READSI; **kedua:** petani aktif yang bertindak sebagai agen perubahan yang mempunyai potensi untuk memotivasi petani lainnya dalam peningkatan kehidupan; **ketiga:** petani yang tidak memiliki lahan dan petani yang memiliki lahan sempit dan berpotensi untuk mengembangkan sumber dayanya sebagai sumber pendapatan keluarga; **keempat:** kepala keluarga perempuan yang akan difasilitasi oleh program dalam upaya pengembangan usaha tani lahan pekarangan, perbaikan gizi dan pengelolaan keuangan. Jumlah sasaran anggota Program READSI antara lain; laki-laki 2.558 orang, sedangkan perempuan 699 orang dan total anggota Program READSI ialah 3.257 orang.¹

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang secara tetap memberi kontribusi maksimal bagi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat setiap tahunnya persentase sektor ini selalu mengalami peningkatan, tahun 2019 kontribusi sektor ini bagi PDRB sebesar 27,92%, pada tahun 2020 sebesar 28,51%, pada tahun 2021 sebesar 29,17% dan pada tahun 2022 sebesar 29,60% (NTT dalam angka 2019-2022). Demikian halnya di Kabupaten Kupang,

¹ *Pedoman Pelaksanaan Program READSI Tahun 2021*

kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada periode yang sama memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB. Hal tersebut seperti terlihat pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.1

Data Wilayah, Sasaran dan Jumlah Kelompok Tani

Wilayah Program READSI Tahun 2019-2024

NO	Kecamatan	Desa	Status Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Amfoang Timur	Nunuanah	Desa Lama	7 kelompok
		Kifu		7 kelompok
		Netemnanu Selatan		7 kelompok
		Netemnanu Utara		7 kelompok
2	Amfoang Selatan	Oh Aem I	Desa Baru	7 kelompok
		Oh Aem II		7 kelompok
3	Amfoang Tengah	Binafu		7 kelompok
		Bonmuti		7 kelompok
4	Fatuleu Barat	Tuakau		7 kelompok
		Naitae		7 kelompok
5	Kupang Barat	Oetmanunu		7 kelompok
		Sumlili		7 kelompok
6	Amabi Oefeto Timur	Seki		7 kelompok
		Oemofa		7 kelompok
7	Amarasi Timur	Enoraen		7 kelompok
		Oebesi		7 kelompok
8	Takari	Oelnineno		7 kelompok
9	Semau	Uitoa		7 kelompok
10	Semau Selatan	Naikean		7 kelompok
		Uitiuana		7 kelompok
	10 kecamatan	20 desa		140 Poktan

Sumber; Laporan Pelaksanaan Kegiatan READSI Kabupaten Kupang 2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB juga sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya tersedia. Dengan demikian, dapat membantu

pemerintah daerah dalam merencanakan dan menetapkan strategi pembangunan daerah yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan di Provinsi NTT maupun di Kabupaten Kupang.

Tabel 1.2

Persentase Kontribusi 5 (lima) Sektor Terbesar Pembentuk PDRB
Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2022

NO	Sektor Kunci	Provinsi NTT				Kabupaten Kupang			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,92	28,51	29,17	29,60	41,58	42,48	43,42	44,00
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,50	11,16	11,48	12,05	13,48	12,98	13,52	13,36
3	Konstruksi	10,87	9,82	10,36	10,20	12,69	11,47	11,76	11,66
4	Informasi dan Komunikasi	6,63	7,44	7,41	7,28	4,04	4,45	4,42	4,49
5	Transportasi dan Pergudangan	5,47	4,62	4,56	4,84	5,35	5,19	5,08	5,24

Sumber; Hasil Olahan dari Prov. NTT dan Kab, Kupang dalam Angka Tahun 2019-2022

Tabel 1.2 menunjukkan lima sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang. Teridentifikasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor kunci dan unggulan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Walaupun demikian masih banyak masyarakat di Kabupaten Kupang bahkan NTT yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin di provinsi NTT, pada tahun 2019 sebanyak; 1.146 orang, pada tahun 2020 sebanyak; 1.154 orang, pada tahun 2021 sebanyak; 1.169 orang dan pada tahun 2022 sebanyak; 1.132 orang. Sedangkan di Kabupaten Kupang jumlah masyarakat miskin pada tahun 2019 sebanyak; 92 orang, pada tahun 2020 sebanyak; 95 orang, pada tahun 2021 sebanyak; 91 orang dan pada tahun 2022

sebanyak; 88 orang (BPS Prov. NTT dalam angka 2019-2022). Ternyata penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah mayoritas masyarakat NTT. Jumlah penduduk NTT yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak; 1.166.258 orang, pada tahun 2020 sebanyak; 1.402.071 orang, pada tahun 2021 sebanyak; 1.414.841 orang dan pada tahun 2022 sebanyak; 1.438.901 orang (BPS Prov. NTT dalam angka 2019-2022).

Program READSI yang berjalan di Kabupaten Kupang Provinsi NTT sebagai program pemberdayaan masyarakat petani, bukan saja persoalan lahan pertanian namun untuk meningkatkan mata pencarian di pedesaan dan juga memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan baik secara individu maupun kelompok, sehingga masyarakat di Kabupaten Kupang dapat keluar dari garis kemiskinan.² Program READSI merupakan program lanjutan atau replikasi dari Program READ yang sebelumnya dilaksanakan Kabupaten Kupang dan Belu tahun 2015-2017. Kabupaten Kupang merupakan kabupaten yang ditetapkan untuk melanjutkan Program READ, melalui penyempurnaan yang disebut dengan READSI.

Kecamatan Kupang Barat merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang menerima Program READSI di Kabupaten Kupang, Program ini dilaksanakan di dua desa yakni Desa Oetmanunu dan Desa Sumlili dengan tujuan yang sama untuk mengurangi angka kemiskinan di pedesaan (tabel 1.1). Secara faktual READSI telah 4 tahun diimplementasikan yakni 2019-2023. Sektor

² BPS Provinsi NTT. *Profil Sektor Pertanian Provinsi NTT Tahun 2020*

pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan pembentuk PDRB Kabupaten Kupang sekaligus merupakan sektor mayoritas lapangan usaha masyarakat, akan tetapi kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami percepatan pertumbuhannya. Argumentasi ini yang mendasari dibutuhkan suatu kajian dan analisis melalui suatu penelitian dengan judul; Efektivitas Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling-Up Initiative* (READSI) (Studi Kasus Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Program READSI di Desa Sumlili dan Desa Oetmanunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Program READSI dan dampaknya terhadap masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut;

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Efektivitas Program READSI dalam pemberdayaan masyarakat petani.
2. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik khususnya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam meningkatkan hasil panen padi melalui program yang ada di kelompok tani dan bagi pemerintah dalam menetapkan kelanjutan dari program.